

ABSTRAK

Fujiyani Lestari (1215010065): *Pemberitaan Proses Pengadilan Para Pemimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam Surat Kabar Sipatahoenan Tahun 1930*

Masa Pergerakan Nasional di Indonesia merujuk pada periode awal abad ke-20 ketika kesadaran nasionalisme dan perjuangan melawan penjajahan Belanda mulai berkembang. Hal tersebut ditandai dengan keberadaan organisasi modern yang dipelopori oleh organisasi Budi Utomo, hingga munculnya organisasi yang bersifat kedaerahan salah satunya organisasi Paguyuban Pasundan yang beretnis Sunda. Setiap organisasi memiliki surat kabar sebagai alat komunikasinya, bahkan sebagai corong politik organisasi tersebut. Pada zaman kolonial Belanda, bukan hanya surat kabar berbahasa Melayu atau bahasa Belanda tetapi terdapat surat kabar berbahasa Sunda salah satunya surat kabar *Sipatahoenan*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang memiliki empat tahapan, yaitu Heuristik (Penghimpunan sumber), Kritik (verifikasi sumber), Interpretasi (penafsiran sumber) dan Historiografi (penulisan sumber sejarah). Meliputi studi literatur terhadap arsip, surat kabar sezaman, buku dan sumber-sumber lain yang relevan.

Hasil penelitian Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1927 bersifat tidak mau bekerja sama dengan pihak kolonial dan bersifat radikal, dengan artian segala bentuk pergerakan yang dilakukan oleh Ir. Soekarno dan kawan-kawannya tidak ada campur tangan dengan pihak kolonial. PNI melakukan propagandanya melalui kursus-kursus, rapat-rapat, dan aksi masa. Namun, hal tersebut membuat pihak kolonial resah hingga Ir. Soekarno mendapat peringatan. Pihak kolonial Belanda mempunyai mata-mata untuk menyelidiki segala pergerakan yang dilakukan oleh PNI, hingga akhir 1929 tersiar kabar PNI akan melakukan pemberontakan ada tahun 1930 yang mengakibatkan semua penggeledahan berupa surat-surat dan dokumen milik anggota-anggota PNI disita. Pemberitaan persidangan pemimpin PNI dalam *Sipatahoenan* membentuk opini publik di kalangan pembaca Sunda bahwa kolonialisme menggunakan hukum sebagai alat politik, sedangkan PNI berjuang untuk kemerdekaan. Hal ini memperluas simpati pada Soekarno dan memperkuat legitimasi PNI sebagai bagian penting dari pergerakan nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa pers lokal bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga agen pembentuk kesadaran politik bangsa.